hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan tentang ketidakadanya kemanfaatan yang kembali padanya.

Itulah yang dimaksud oleh ulama *Hanafiyyah* dengan ucapannya, “
Sesungguhnya wanita itu bertindak mengenai haknya dan dia pun berwenang karena ke-*baligh* dan ke-*aqilah*-annya. Oleh karena itulah, dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, memilih suami, sedangkan dimintanya wali untuk menikahkannya agar tidak dianggap tidak mempunyai rasa malu.

Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist tersebut, menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.

Mereka (golongan Hanafi) berpendapat: bahwa hadist-hadist yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti: karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qias adalah diperbolehkan.

Disamping argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur’an, Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang